



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 26 JULI – 30 JULI 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, Komisi IX DPR RI mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

A. Dasar Kegiatan

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019.
2. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, tanggal 8 Mei 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
2. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor Pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Sumatera Utara.
4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Utara terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

C. Kegiatan yang dilaksanakan

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara di damping oleh:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Kesehatan dan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
3. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
4. Balai POM Kabupaten Nias Selatan
5. BKKBN Provinsi Sumatera Utara
6. RSUP H. Adam Malik
7. Kepala BBPLK Medan

D. Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh **DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA.**

NO	NO. ANGG	NAMA	JABATAN	FRAKSI	DAPII
1.	A-460	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M. Ag., M. Hum., MA	KETUA TIM/WAKIL KETUA	PAN	SUMUT II
2.	A-349	Drg. PUTIH SARI	WAKIL KETUA	P.GERINDRA	JABAR VII
3.	A-150	Ir. KETUT SUSTIAWAN	ANGGOTA	PDIP	JABAR I
4.	A-155	dr. RIBKA TJIPTANING	ANGGOTA	PDIP	JABAR IV
5.	A-184	DR. DEWI ARYANI, S. SosM. Si	ANGGOTA	PDIP	JATENG IX
6.	A-202	ABIDIN FIKRI	ANGGOTA	PDIP	JATIM IX
7.	A-208	MARINUS GEA, SE, M.Ak	ANGGOTA	PDIP	BANTEN III
8.	A-238	DELIA PRATIWI Br. SITEPU	ANGGOTA	P.GOLKAR	SUMUT III
9.	A-260	ICHSAN FIRDAUS	ANGGOTA	P.GOLKAR	JABAR V
10.	A-312	H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc.	ANGGOTA	P.GOLKAR	SULSEL II
11.	A-315	Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG	ANGGOTA	P.GOLKAR	SULSEL III
12.	A-325	KHAIDIR ABDURRAHMAN, SIP	ANGGOTA	P.GERINDRA	ACEH II
13.	A-379	H. WILGO ZAINAR, SE. MBA	ANGGOTA	P.GERINDRA	NTB
14.	A-428	Dra. LUCY KURNIASARI	ANGGOTA	P.DEMOKRAT	JATIM I
15.	A-449	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	ANGGOTA	P.DEMOKRAT	SULTENG
16.	A-450	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE.	ANGGOTA	P.DEMOKRAT	SULSEL I
17.	A-477	H. HAERUDIN, S.Ag., MH	ANGGOTA	PAN	JABAR XI
18.	A-483	H. MUHAMMAD HANAFI, S.Sos	ANGGOTA	PAN	JATENG VIII
19.	A-39	H. MAFIRION	ANGGOTA	PKB	RIAU II
20.	A-42	ARYANTO MUNAWAR	ANGGOTA	PKB	LAMPUNG I
21.	A-77	Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA.	ANGGOTA	PKB	BANTEN III
22.	A-95	H. AHMAD ZAINUDIN, Lc	ANGGOTA	PKS	DKI I
23.	A-535	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si	ANGGOTA	PPP	BANTEN III
24.	A-7	IRMA SURYANI	ANGGOTA	P.NASDEM	SUMSEL II
25.	A-17	AMELIA ANGGRAINI	ANGGOTA	P.NASDEM	JATENG II
26.	-	RUDIYANTO, S.Sos	SET. KOMISI IX DPR RI		
27.	-	LISTYA SHINTYA DEBBY, SE	SET. KOMISI IX DPR RI		
28.	-	MUHAMMAD YUNUS	SET. KOMISI IX DPR RI		
29.	-	HASAN BASRI, S.Pd	TENAGA AHLI BID. KESEHATAN		
30.	-	DENY FITRIADI, SH., M.Kn	TENAGA AHLI BID. KETENAGAKERJAAN		
31.	-	ZIA UL-BARR	BAG. TV PARLEMEN DPR RI		
32.	-	SINGGIH KINANTI RIMBANI	BAG. PEMBERITAAN & MEDIA SOSIAL DPR RI		

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

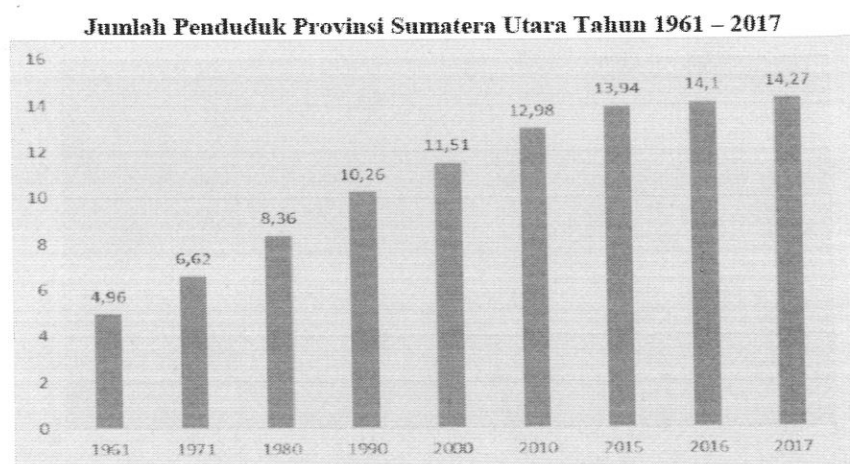
Berdasarkan profil Provinsi Sumatera Utara, dilihat dari situs www.wikipedia.org memiliki luas daratan 72.981,23 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Prov. Aceh dan Selat Malaka.
2. Selatan : Prov. Riau, Prov. Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia.
3. Barat : Prov. Aceh dan Samudera Indonesia
4. Timur : Selat Malaka

Terdapat 419 pulau di Provinsi Sumatera Utara dan 2 Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Sumatera Utara terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota.

Kependudukan

Sumatera Utara merupakan Provinsi ke empat terbesar dalam jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk Sumatera Utara adalah 14.262.147 jiwa yang terdiri dari 7.116.896 jiwa laki-laki dan 7.145.251 jiwa perempuan. Rata-rata jumlah anggota keluarga di Sumatera Utara pada tahun 2017 adalah sebesar 4,28 KK yang berarti rata-rata setiap keluarga memiliki 4-5 anggota keluarga. Adapun sebaran kabupaten/kota dengan rata-rata jumlah anggota keluarganya paling banyak adalah Kabupaten Pakpak Barat yaitu 5,61 dan yang paling sedikit Kabupaten Karo 3,71 orang.



Sumber: BPS Prov. Sumatera Utara

A. Gambaran Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemandirian, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan realistis melalui peningkatan upaya kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemandirian dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara memiliki andil dalam penyelenggaraan kesehatan untuk menjamin hak dan kesehatan masyarakat.

Situsasi Derajat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Visi Pembangunan Kesehatan Daerah Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan serta dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka telah ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu "Mewujudkan Provinsi Sumatera Utara Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing". Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan angka BPS, AKB mampu diturunkan dari 39,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 25,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010). Berdasarkan trend penurunan yang terjadi kurun waktu 2001 -2010, dimana penurunan

terjadi sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2015 yaitu 19 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 17,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 diperkirakan AKB menurun menjadi 16,3 per 1.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2017 jumlah bayi yang meninggal adalah sebanyak 1.066 bayi dari 300.358 sasaran lahir hidup; Jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi pada tahun 2016 yakni 1.069 dari 303.230 sasaran lahir hidup, maka jumlah kematian bayi tahun 2017 mengalami penurunan.

Dari sisi Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2014 - 2016, dimana terjadi peningkatan umur harapan hidup penduduk sebesar 0,08 tahun setiap tahunnya. Berdasarkan data pada Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPS, diketahui bahwa UHH penduduk Sumatera Utara tahun 2016 adalah 68,29 tahun, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yakni 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 68,21 tahun pada tahun 2015. Dari hasil perhitungan trend kecenderungan diperkirakan bahwa Umur Harapan Hidup Tahun 2017 adalah 68,37 Tahun.

Jumlah Puskesmas yang Mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

Pada tahun 2017, dari 571 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdapat 156 puskesmas yang mampu PONED. Angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 yakni 156 Puskesmas, tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2015 yakni 153 puskesmas, tahun 2014 yaitu 147 puskesmas, tahun 2013 yaitu 137 puskesmas, tahun 2012 yaitu 94 puskesmas dan tahun 2011 yaitu 98 puskesmas, maka jumlah puskesmas yang mampu PONED tahun 2017 mengalami peningkatan. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu 149 puskesmas maka capaian puskesmas yang mampu PONED tahun 2017 telah melampaui target.

Sebagai kelanjutan dari tahun 2015 maka pada tahun 2016 Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi sudah sebanyak 20 Puskesmas. Rendahnya capaian di tahun 2016 karena di tahun tersebut dilaksanakan persiapan dan proses pendampingan akreditasi sampai puskesmas siap untuk diakreditasi.

Hasil persiapan dan pendampingan akreditasi di tahun 2016 membuahkan hasil yang cukup signifikan yakni peningkatan jumlah puskesmas yang terakreditasi di tahun 2017 menjadi 153 puskesmas yang tersebar di 27 Kab/Kota.

Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yaitu 40 Puskesmas maka Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi tahun 2017 sudah jauh melampaui target (382,50%).

Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi

Sampai dengan tahun 2017, jumlah rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang terakreditasi adalah sebanyak 126 rumah sakit, terdiri dari 26 RS dengan status akreditasi Versi 2007 dan 100 RS dengan status akreditasi Versi 2012. Capaian jumlah rumah sakit yang terakreditasi tahun 2017 ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu namun 94 RS, tahun 2015 yaitu 80 RS dan tahun 2014 sebanyak 74 RS. Dan bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yaitu 90 RS.

Ketersediaan Obat dan Vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Tahun 2012 - 2017

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
% ketersediaan obat dan vaksin	87	52	72,07	79,43	78,59	85,17

Sumber : Laporan Bidang SDK Tahun 2017

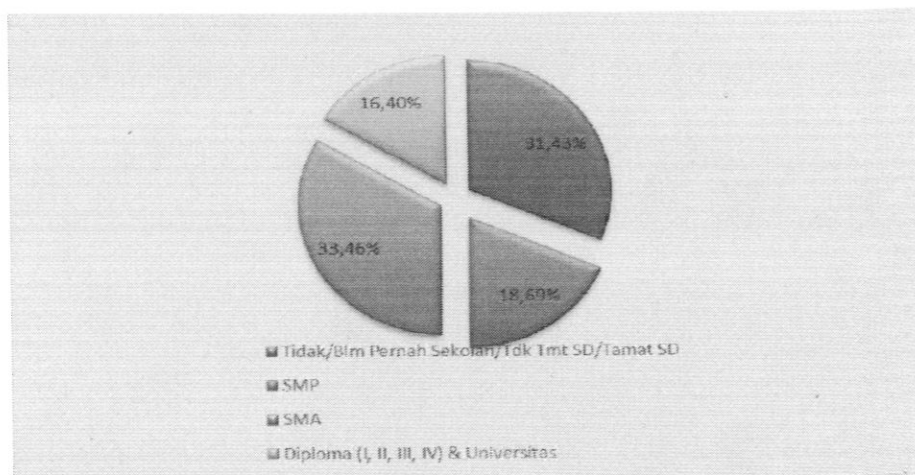
Persentase ketersediaan obat dan vaksin menunjukkan trend fluktuatif selama kurun waktu 2012 - 2017, dan penurunan tajam terjadi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 35% dibandingkan tahun 2012.

Pada tahun 2014, persentase ketersediaan obat dan vaksin meningkat kembali menjadi 72,07% dan pada tahun 2015 menjadi 79,43%. Pada tahun 2016 rata-rata persentase ketersediaan obat dan vaksin sedikit menurun menjadi 78,59%. Kemudian pada tahun 2017, persentase ketersediaan obat dan vaksin dapat ditingkatkan menjadi 85,17%.

B. Gambaran Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2017, sebagian besar angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas di Sumatera Utara adalah tamat SMA (33,46%). Selanjutnya adalah tamatan SD kebawah (31,43%), SMP (18,69%), serta angkatan kerja berpendidikan Diploma I,II,III & IV serta Universitas (16,40%).

Persentase Angkatan Kerja 15 Tahun keatas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017



Sumber : BPS Sumatera Utara 2017

Sampai dengan Agustus 2017, jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja sebanyak 6.365.989 jiwa. Lebih dari sepertiga penduduk berusia 15 tahun ke atas (38,50%) bekerja menjadi buruh/karyawan atau pegawai. 19,80% berusaha sendiri, berusaha dan dibantu buruh tetap (15,16%), serta sebagian kecil dilaporkan menjadi pengusaha dengan mempekerjakan buruh tetap/karyawan (3,50%).

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian (perkebunan, kehutanan dan perikanan) atau sebanyak 37,52%, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,16%, jasa kemasyarakatan, sosial perorangan sebesar 18,38%, sektor industri hanya 9,02%.

Sisanya bekerja pada sektor pertambangan, kelistrikan, konstruksi, air minum, bangunan, angkutan, komunikasi serta sektor keuangan. (BPS Sumut, 2017).

BAB II

HASIL KUNJUNGAN

1. BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk tahun anggaran 2019 adalah Rp. 42.436.674.000,- dengan realisasi atau belanja langsung Rp. 15.679.586.361,-
- Di Sumut banyak proyek infrastruktur, namun masih belum bisa menyerap tenaga kerja, oleh karena itu Disnaker berupaya untuk meningkatkan investasi padat karya dibandingkan dengan investasi padat modal, revitalisasi BLK, mengadakan pelatihan berbasis kompetensi serta program pemagangan kepada pencari kerja baru.
- Untuk saat ini, program pemagangan ke Jepang sudah dilakukan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
- Untuk jumlah tenaga asing, saat ini berjumlah 601 orang, ini sangat jauh dibandingkan dengan tenaga kerja lokal sebanyak 2.162.495 orang. Jumlah TKA ini dari tahun ke tahun jauh berkurang, karena tahun 2016 jumlah TKA adalah 8560 orang, tahun 2017 berjumlah 1544 orang. Jumlah pekerja ini baik lokal maupun asing diawasi oleh tenaga pengawas yang berjumlah 79 orang.
- Adapun prioritas bidang ketenagakerjaan adalah mengurangi angka pengangguran dengan menabahkan angkatan kerja pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Namun saat ini tantangan yang dihadapi adalah masalah alokasi anggaran yang sangat minim serta masih ada BLK yang tidak berfungsi secara optimal dan memadai.
- Dari sisi pengupahan, masih ada keinginan serikat buruh agar ketentuan PP 78 tahun 2015 ini dihapus. Mereka tidak selalu menuntut kenaikan upah setiap tahun, namun meminta upaya dai pemerintah untuk lebih giat menekan inflasi agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dengan penghasilan yang ada.
- Di Sumut masih terdapat pengusaha/pemberi kerja yang tidak menyanggupi membayar upah sesuai UMR.
- Untuk hubungan industrial, di Sumut hampir tidak ada masalah yang berarti dengan jumlah penyelesaian kasus di Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 312 kasus pada tahun 2018, namun tidak disebutkan dari berapa pengaduan/kasus.

B. BPJS KETENAGAKERJAAN

- Jumlah perusahaan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut per bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut :
 - b. Badan Usaha/pemebri kerja aktif berjumlah 54,968,
 - c. Badan Usaha/pemberi kerja belum terdaftar berjumlah 449,618.
 - Kondisi kepesertaan yang berjumlah 3.082.744 orang peserta aktif dan tidak aktif BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut adalah :
 - a. Tenaga kerja Penerima Upah : 979.942
 - b. Tenaga kerja BPU : 68.163
 - c. Tenaga Kerja Jasa Konstruksi : 470.038
 - d. Tenaga kerja Non Aktif : 1.564.601
- Sehingga persentase tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah 48,83% dari angkatan kerja yang berjumlah 6.365.989 orang (berdasarkan data BPS tahun 2018)

C. BP3TKI MEDAN

- Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan penempatan PMI ke luar negeri tahun 2018 berjumlah 19000 orang, untuk sampai pertengahan tahun 2019 sudah mencapai 9000an PMI dengan hampir seluruhnya penempatan Malaysia.
- Terkait dengan program one channel system untuk pemberangkatan PMI ke timur Tengah, BP3TKI Medan tidak begitu mengetahui karena penempatan PMI di Sumatera Utara hanya Asia Tenggara, bukan ke Timur Tengah. Selain itu aturan tentang LTSA juga belum ada di Sumut.
- Permasalahan yang agak serius yaitu hampir seluruh aparatur desa belum mengetahui tentang UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerj Migran Indonesia (UU PPMI).
- Untuk pemulangan PMI bermasalah, Medan mengalami kesulitan biaya karena tidak hanya menampung PMI dari Sumatera Utara saja, melainkan ada yang dari NTB dan provinsi lainnya. Ini menjadi beban bagi BP3TKI Medan.

D. BBPLK Medan

- Secara keseluruhan, jumlah alokasi anggaran BBPLK Medan mengalami peningkatan, kenaikan ini berbanding lurus dengan kenaikan target peserta pelatihan, yaitu 3.104 orang (2015), 5.040 orang (2016), 6.336 orang (2017) dan 10.408 orang (2018) dan untuk pertama kalinya tahun 2018 menyelenggarakan pelatihan bidang Pariwisata.
- Adapun tantangan yang dihadapi BPLK Medan adalah :
 - a. Jumlah instruktur yang masih kurang mencukupi.
 - b. Jumlah ruang kelas dan workshop masih kurang memadai.
 - c. Sinergitas dengan industri yang relevan dengan program pelatihan yang dilaksanakan BBPLK Medan.

- BBPLK Medan juga telah melakukan kerjasama dengan negar Austria dalam hal pengembangan kapasitas Balai Latihan yang salah satunya melalui pembangunan workshop perhotelan dan Carpentry (tukang kayu) beserta peralatan pelatihannya.
- Untuk peserta didik yang saat ini dilatih pada BBPLK Medan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, bukan hanya dari Sumatera Utara saja.
- Adapun program pelatihan unggulan di BBPLK Medan antara lain, perkayuan, gambar 2 dimensi (yang akan ditingkatkan menjadi 3 dimensi), Pariwisata serta Surveyor. Khusus untuk Surveyor ini merupakan hasil kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan apabila pelatihan selesai, mereka langsung direkrut oleh BPN sebagai tenaga pengukuran tanah.
- Untuk sarana dan prasarana, memang BBPLK Medan masih terdapat kekurangan, yaitu lingkungan Balai Latihan yang masih seing digenangi banjir saat hujan turun, serta lokasi yang cukup jauh dari ruas jalan utama, yaitu sekitar 800 meter, selanjutnya jumlah asrama yang belum cukup menampung siswa untuk seluruh paket pelatihan.

2. BIDANG KESEHATAN

- Jumlah peserta JKN-KIS di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 10.729.918 jiwa (dari 14.874.889 jiwa), atau sekitar 72,13%, terdiri dari PBI APBN (4.568.727 jiwa), PBI Provinsi (430.677 jiwa), PBI Kabupaten/Kota (1.056.444 jiwa), pemerintah non PNS (63.910 jiwa), pegawai BUMN (162.338 jiwa), pegawai swasta (1.103.196 jiwa), pegawai bukan penerima upah/pbpu (2.178.481 jiwa), investor (4.030 jiwa), pemberi kerja (1.424 jiwa), penerima pasien non PNS (147.576 jiwa), penerima pension TNI/POLRI (41.533 jiwa), penerima pension pejabat negara (109 jiwa), penerima pension pegawai swasta (103.773 jiwa) veteran (10.249 jiwa) dan perintis kemerdekaan (39 jiwa).
- Fasilitas kesehatan di Provinsi Sumatera Barat terdapat 581 Puskesmas, 166 Puskesmas Rawat Inap dan 415 Puskesmas Non Rawat Inap.
- Secara nasional jumlah FKRTL yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah 2.431, terdiri dari 2.198 RS dan 23 Klinik utara
- Terkait permasalahan ketersediaan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit pada beberapa daerah, misalnya Kab Nias Selatan yang hanya memiliki 1 rumah sakit dengan kondisi yang belum terakreditasi dan SDM yang tidak memenuhi ketentuan. BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk pemenuhan persyaratan kerjasama rumah sakit tersebut.

- Adapun permasalahan yang dihadapi BPJS Kesehatan yaitu beberapa faskes masih melihat profit berdasarkan kasus per kasus yang dilayani bukan keseluruhan kasus sehingga kecenderungan melakukan efisiensi pelayanan yang berlebihan dan memberikan pelayanan secara berulang-ulang atau terpisah.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan penekanan kepada dinas-dinas di daerah agar memperhatikan tingkat pengangguran di wilayah masing-masing agar tidak meningkat setiap tahunnya dengan mengupayakan pelatihan berbasis kompetensi, revitalisasi BLK dan lebih memperbanyak program pemagangan.
2. Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk lebih memperhatikan terkait sosialisasi UU PPMI di daerah-daerah, mengupayakan agar LTSA di daerah - daerah mempunyai payung hukum serta terhadap lokasi pemulangan PMI bermasalah.
3. Komisi IX DPR RI mendesak PJS Ketenagakerjaan untuk menekan Kantor-kantor wilayah masing-masing daerah untuk lebih meningkatkan jumlah kepesertaannya karena masih terdapat wilayah yang jumlah kepesertaannya dibawah 50%.

BIDANG KESEHATAN

4. Komisi IX mendesak pemerintah untuk melakukan koordinasi terkait permasalahan kerjasama antara RS dan BPJS Kesehatan, pada tingkat daerah , diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kab/Kota untuk dapat melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan JKN di RS yang merupakan UPTD milik daerah termasuk diantaranya permasalahan kerjasama.
5. Selain pemerintah pusat dan daerah, Komisi IX mendesak melalui Kementerian Kesehatan agar Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan PERSI selaku Organisasi yang independen juga turut mengawal dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan BPJS dan Rumah Sakit.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kemeterian Kesehatan untuk membuat sistem informasi terpadu di Rumah Sakit terkait pelayanan di RS.
7. Terkait adanya dugaan penyimpangan pencairan dana BPJS Kesehatan di beberapa RS di Sumatera Utara, Komisi IX DPR RI Mendesak Direksi BPJS Kesehatan, Asosiasi RS untuk melakukan audiensi guna menjelaskan dan meminta penjelasan terkait hal tersebut.

V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Sumatera Utara pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 – 2019 yang telah dilaksanakan mulai tanggal 26 – 30 Juli 2019. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah di daerah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Jakarta, 26 Juli 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA TIM,**

DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA.

A-460